



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 283 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK GARUDA BANGSA

BIDANG STUDI KEAHlian BISNIS DAN MANAJEMEN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN BINA BANGSA

JL. NANGGERANG NO. 70 DESA NANGGERANG KECAMATAN TAJURHALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

6. bahwa bermasalah mengimbangi setbagaimana dimaksud dalam huruf a, perlukan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GARUDA BANGSA Tajurhalang Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen;

1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Keuangan Tata Niaga,
2. Kompetensi Study Keahlian : Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran.

atas nama Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Jl. Nanggerang No. 70 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang,

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3483);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Desa Nanggerang Nomor : 378/181/XI/2009 tanggal 31 November 2009 tentang Rekomendasi Pendirian Sekolah SMK Garuda Bangsa
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Tajurhalang Nomor : 421.1/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Rekomendasi pendirian Sekolah.
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/3395/ Penlatkertrans /2009, Tanggal 21 Desember 2009 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK.

4. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 017/K/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009 tentang Rekomendasi.
5. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 4225/06/Dikoperinday/2010 tanggal 4 Januari 2010
6. Surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/13-Dikmen tanggal 07 Januari 2010 tentang Study kelayakan
7. Berita acara hasil study kelayakan SMK Garuda Bangsa.

MEMERINTAHKAN
SAHAGA

- Menetapkan KESATU : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Garuda Bangsa Bidang Studi Keahlian : Bisnis Manajemen :
1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Keuangan, Tata Niaga
 2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran yang berlokasi di Jl. Nanggerang No. 70 Desa Nanggerang Kecamatan Tajurhalang.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepenuhnya mematuhi semua ketentuan peraturan perUndangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Tajurhalang,
4. Yth. Kepala Desa Nangerang Kecamatan Tajurhalang.